

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu tolak ukur dalam perekonomian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu Negara dalam jangka panjang. Salah satu indikator keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah yang selalu mengalami kenaikan dengan diiringi meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari adanya peran pembangunan suatu daerah untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat supaya semakin maju dan berkembang.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pembangunan ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sosial dan budaya yang ditandai dengan kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang pada suatu Negara. Kenaikan pendapatan riil per kapita mencerminkan tingkat pendapatan yang semakin merata dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari serangkaian peristiwa dan dampaknya pada perekonomian serta peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari tahap-tahap proses pembangunan.

Laju pembangunan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).¹ Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) mengindikasikan laju pembangunan ekonomi berdampak pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Sebaliknya, penurunan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto mengindikasikan laju perekonomian tidak stabil dan memicu timbulnya permasalahan ekonomi.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka membangun suatu Negara yang maju dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki makna yang tidak jauh berbeda.² Pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada suatu proses yang tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk, pemerataan pendapatan dan perubahan struktur perekonomian, melainkan memfokuskan serta membandingkan perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun secara kuantitatif. Sedangkan pembangunan ekonomi bersifat sebaliknya dan lebih menekankan pada kenaikan pendapatan perkapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2012-2019 mengalami fluktuatif yang dipengaruhi oleh sisi produksi dan sisi pengeluaran. Pada sisi produksi mengalami kenaikan yaitu segi pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, transportasi dan perdagangan serta jasa. Sedangkan sisi

¹ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010), hal. 11

² M.L Jhinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 6

pengeluaran yang tumbuh positif dan menguat yaitu pengeluaran konsumsi RT, pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) serta pengeluaran konsumsi pemerintah.³

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019

Tahun	Persentase
2012	6,64%
2013	6,08%
2014	5,86%
2015	5,44%
2016	5,55%
2017	5,45%
2018	5,50%
2019	5,52%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2012 sampai dengan 2013 yaitu 6,64% pada tahun 2012, menjadi 6,08% pada tahun 2013 dan 5,86% pada tahun 2014. Perekonomian di Provinsi Jawa Timur dilakukan berdasarkan acuan atas harga konstan tahun 2010. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012-2013 didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu kategori industri pengolahan (28,97%), perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan reparasi motor (17,94%) serta pertanian, kehutanan dan perikanan (14,18%). Dari segi penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2013, komponen pengeluaran konsumsi

³ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019" dalam <https://www.jatim.bps.go.id>, diakses 10 September 2020

rumah tangga mempunyai sumber pertumbuhan tertinggi dan diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto.

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (*c-to-c*) Jawa Timur sampai dengan tahun 2016 mencapai 5,55% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,53 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,02%). Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap Nasional sebesar 14,44%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,55%, salah satu faktor pendorongnya adalah menguatnya kinerja sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 kembali melemah menjadi 5,45%, hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi tanaman pangan. Dan pada tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 5,50% (tahun 2018) dan 5,52% (tahun 2019), hal ini disebabkan oleh peningkatan sisi produksi yaitu kenaikan pada semua sektor lapangan usaha yaitu lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman.

Pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif menjadi salah satu sarana yang baik untuk menjembatani sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperoleh pembiayaan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah proses berkelanjutan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang, sehingga pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejalanannya pembangunan ekonomi tersebut masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur menjadi

boomerang yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Pasalnya kemiskinan tidak hanya menyangkut permasalahan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jakarta dan Banten). Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi inilah yang menyebabkan menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi rendah.

Kemiskinan juga tidak terlepas dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah garis yang menunjukkan harga yang harus dibayar oleh sekelompok acuan guna memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka rata-rata yang masih tergolong tinggi. Sehingga dalam hal ini, patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah supaya dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Pulau Jawa
Pada Tahun 2012-2019

Provinsi	Persentase Jumlah Penduduk Miskin							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,55	3,47
Jawa Barat	9,89	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	6,91
Jawa Tengah	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	11,19	10,8
DI Yogyakarta	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	11,81	11,7
Jawa Timur	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	10,85	10,20
Banten	5,71	5,89	5,90	5,75	5,36	5,59	5,25	5,09
Nasional	11,66	11,46	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,41

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, bila dibandingkan dengan lima provinsi lain di Pulau Jawa, rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Timur menempati posisi ketiga di bawah Jawa Tengah. Berbagai kebijakan dan program-program telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mengatasi penurunan kemiskinan, namun hasilnya belum maksimal dan masih jauh dari pokok permasalahan. Dapat dilihat persentase jumlah penduduk miskin antar Provinsi di Pulau Jawa terlihat mengalami penurunan jumlahnya sepanjang tahun 2012-2019. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur lebih rendah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin antar Provinsi di Pulau

Jawa dari tahun 2012-2019 menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun ada kecenderungan yang semakin turun.

Tabel 1.3
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Pada Tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	4.961,00	13,08
2013	4.865,82	12,73
2014	4.748,42	12,28
2015	4.775,97	12,28
2016	4.638,53	11,85
2017	4.405,27	11,20
2018	4.292,15	10,85
2019	4.056,00	10,20

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tercatat 4.748,42 ribu jiwa, sebelumnya ditahun 2013 tercatat 4.865,82 atau 12,73% dari total penduduk Jawa Timur dari tahun 2012-2019 selalu mengalami penurunan, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Jawa Timur 4.056,00 ribu jiwa (10,20%), berkurang dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 sebesar 4.292,15 ribu jiwa (10,85%). Persentase penduduk miskin di tahun 2016 sebesar 11,85% turun menjadi 11,20% pada tahun 2017. Sementara di penduduk miskin tahun 2012 sebesar 13,08% turun menjadi 12,73% pada tahun 2013.

Proses pembangunan ekonomi disuatu Negara, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan yang tidak lain berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Dalam hal ini salah satu permasalahan di dalamnya adalah upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa

Timur. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat investasi, pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan dan kualitas sumber daya.⁴ Selain itu, tingkat penduduk miskin yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor-faktor pendorong kemiskinan, diantaranya inflasi, penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan kenaikan Indeks Upah Buruh Tanaman Pangan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menjadi perhatian khusus bagi Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi poin utama adalah dengan cara melakukan pembangunan Nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya dengan cara membidik sumber daya yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, baik berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Sumber Daya Manusia.

Dari segi Sumber Daya Modal, investasi merupakan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri dan luar negeri yang digunakan untuk membantu perekonomian. Berdasarkan review dan prospek perekonomian di Indonesia, laju pertumbuhan investasi menempati posisi kedua yaitu 7,0% setelah impor dengan angka 7,1% dalam aspek pembangunan

⁴ Nenny Latifah, et.al., *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17, No. 2, 2017, hal. 109

infrastruktur.⁵ Hal serupa juga didukung dengan harga komoditas yang kembali normal dan efek pelonggaran dari kebijakan moneter yang terjadi pada tahun 2010-2018. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah perlu diarahkan guna menstabilkan dengan memperhatikan momentum pertumbuhan ekonomi secara global dan dapat meningkatkan ekspor.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal sebagai salah satu kebijakan guna sumber pendapatan Negara dan mengatasi defisit neraca pembayaran serta anggaran belanja Negara. Kebijakan investasi termasuk dalam sektor publik, namun kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur seperti tingkat investasi yang tidak produktif, minimnya tingkat tabungan sukarela, tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.⁶

Investasi menjadi sumbangsih dari para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk membantu pembangunan ekonomi, misalnya Penanaman Modal Asing memiliki peran penting dalam perekonomian diantaranya : Pertama, adanya Penanaman Modal Asing dapat mempelajari dan mengaplikasikan teknologi dari Negara-negara maju untuk diterapkan di Negara sendiri. Kedua, adanya Penanaman Modal Asing akan mendorong kerjasama antara pihak dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan volume perdagangan hingga kekancah Internasional. Ketiga, adanya Penanaman Modal Asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Review dan Prospek Perekonomian Indonesia" dalam <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses 17 November 2020

⁶ Dwi Kurniasari, *Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Skripsi: Universitas Lampung, Tidak Diterbitkan: 2017), hal. 6

Negara dengan senantiasa memperbaiki faktor-faktor pendukung dalam negeri.⁷ Oleh karena itu, Penanaman Modal Asing menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.4
Perkembangan Penanaman Modal Asing Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012-2019

Tahun	Penanaman Modal Asing (Triliun Rp)
2012	25,13
2013	33,63
2014	19,29
2015	32,42
2016	26,57
2017	21,49
2018	17,87
2019	12,99

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan tingkat investasi Provinsi Jawa Timur yaitu Penanaman Modal Asing dalam kurun waktu 2012-2019 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian global yang tidak stabil dan kebijakan pemerintah yang masih kurang efektif. Terjadinya kenaikan pada Penanaman Modal Asing didasarkan atas lima sektor usaha besar yaitu listrik, gas dan air (US\$ 1,4 miliar), industri logam dasar, barang

⁷ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2012, Vol. 3, No. 1, hal. 36

logam dan elektronik (US\$ 1,0 miliar), perumahan, kawasan industri dan perkantoran (US\$ 1,0 miliar), pertambangan (US\$ 0,9 miliar) serta tanaman pangan dan perkebunan (US\$ 0,7 miliar).⁸

Selain Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki daya tarik tersendiri bagi investor sebagai meningkatkan asset dan kekayaan, menyiapkan masa depan yang cerah dan penggerak roda perekonomian. Oleh karena itu, Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi penting karena menjadi salah satu sumber pemasukan yang memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.5
Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012-2019

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (Triliun Rp)
2012	28,73
2013	34,85
2014	42,55
2015	35,49
2016	46,33
2017	45,04
2018	33,33
2019	45,45

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2015-2019*, (Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2016), hal. 36

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang positif. Pasalnya tingkat investasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan secara berturut-turut -8,7% dan -23%.⁹ Kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri didasarkan atas lima sektor usaha besar yaitu industri mineral non logam (Rp 8,6 triliun), konstruksi (Rp 7,5 triliun), industri makanan (Rp 6,4 triliun), industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (Rp 4,7 triliun) serta industri listrik, gas dan air (Rp 4,5 triliun). Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri banyak tersebar di Kota Surabaya (Rp 10,89 triliun), Kabupaten Pasuruan (Rp 9,87 triliun), Kabupaten Probolinggo (Rp 8,32 triliun), Kabupaten Malang (Rp 4,74 triliun) dan Kabupaten Gresik (Rp 4,67 triliun).¹⁰

Pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Timur yang tumbuh secara positif dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970.¹¹ Hadirnya Undang-Undang diharapkan semakin memperkuat perananan investasi dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

⁹ *Ibid.*, hal. 38

¹⁰ Wijayanto, "Realisasi Investasi Jatim Lampaui Nasional Terbanyak di Surabaya" dalam <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/14/179392/realisasi-investasi-jatim-lampaui-nasional-terbanyak-di-surabaya>, diakses 17 November 2020

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: JDIH BPK RI, 1967), hal. 3

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Adapun Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan faktor internal berupa bentuk kegiatan penanaman modal dari dalam Negeri yang digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi Nasional, pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi Nasional. Sedangkan Penanaman Modal Asing merupakan faktor eksternal yang digunakan sebagai penguat keberhasilan pembangunan ekonomi berupa suntikan modal yang memberikan kontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, memperbesar perolehan devisa serta memperluas lapangan pekerjaan. Sehingga diharapkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing mampu mensejahterakan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan target penurunan kemiskinan berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2012-2019, hal ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Jawa Timur.
2. Kondisi perekonomian global yang tidak stabil akan mengganggu kesinambungan fiskal untuk senantiasa mendorong perekonomian dalam negeri, sehingga tercipta Penanaman Modal Asing sebagai faktor eksternal sebagai penguat keberhasilan pembangunan ekonomi dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada tahun 2012-2019 yang tumbuh secara positif dapat mempengaruhi keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 ?

2. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 ?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 ?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menambah referensi tambahan bagi seorang peneliti mengenai pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai kontribusi tingkat investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- c. Memberikan sumbangsih dan tolak ukur pemikiran terhadap kajian bidang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan, referensi, pengambilan keputusan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berkurang atau mengalami penurunan dan sesuai dengan target pemerintah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pendukung, memperkaya informasi untuk penelitian selanjutnya, pengembangan bidang keilmuan khususnya ekonomi serta sebagai sumbangsih perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan kajian ekonomi khususnya pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah suatu ruang atau batasan tertentu supaya pokok pembahasan dalam suatu penelitian tidak melebar atau keluar dari topik serta untuk memudahkan dilakukan suatu penelitian supaya lebih efektif dan efisien terhadap suatu objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang dimaksud adalah untuk menguji variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan variabel bebas dan (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1), Penanaman Modal Asing (X_2), dan untuk variabel terikat (Y) adalah Penurunan Tingkat Kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian adalah suatu cakupan dalam kajian tertentu yang dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana untuk dapat

melakukan penelitian secara mendalam dan meluas. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain :

- a. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam kurun waktu lima (5) tahun, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2019.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada bidang ilmu makro, yaitu mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1), Penanaman Modal Asing (X_2), serta pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah suatu penjabaran makna dari suatu makna istilah supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman dan memudahkan pembaca untuk mengetahui makna atau pengertian dalam suatu penelitian.

1. Definisi Konseptual

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1)

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan investor untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari dan dalam kurun waktu jangka panjang. Secara umum, investasi dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi yang dapat dilakukan dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri dan investasi yang dapat dilakukan di luar negeri atau Penanaman Modal Asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan penanaman modal dari, untuk dan oleh pelaku dalam negeri. Artinya penanaman

modal yang dilakukan dari dalam negeri yaitu Indonesia, untuk memulai suatu usaha di Indonesia dan dilakukan dengan menggunakan modal dalam negeri yang dilakukan oleh investor maupun calon investor dari dalam negeri.

b. Penanaman Modal Asing (X_2)

Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan penanaman modal oleh investor maupun calon investor asing yang akan melakukan suatu usaha di dalam negeri dengan menggunakan modal asing atau bisa berpatungan dengan modal dalam negeri. Kegiatan Penanaman Modal Asing terdapat unsur asing (*foreign element*) yang dapat ditentukan oleh kewarganegaran yang berbeda, asal modal dan sebagainya.

c. Penurunan Tingkat Kemiskinan (Y)

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berdasarkan penetapan perhitungan garis kemiskinan masyarakat yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057/hari/satu orang. Penetapan angka tersebut didasarkan atas perhitungan garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan makanan di setarakan 2.100 kkal/kapita/hari, sedangkan kebutuhan non makanan didasarkan atas perumahan, pendidikan dan kesehatan.¹²

¹² *Ibid.*, hal. 109

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini berfokus pada pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2015-2019. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan sarana yang digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui aliran modal baik diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri atau asing. Pesatnya aliran modal dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kedua variabel tersebut, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing maka diharapkan dapat menentukan keberhasilan dalam rangka upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini masing-masing terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari enam bab meliputi :

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II Landasan Teori yang terdiri dari pembahasan semua variabel yang didasarkan pada teori dan para ahli, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian yang berisikan deskripsi data dan pengujian pengujian data melalui teknik analisis data yang digunakan dalam Bab III. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang memaparkan deskripsi objek penelitian, temuan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan dan selanjutnya akan dibahas pada bab lima yaitu pembahasan.
- BAB V Pembahasan yang berisikan hasil analisis data atau pembahasan dari hasil penelitian. Dalam hal ini dijelaskan hasil dari rumusan masalah yang di angkat dari judul. Serta

dilakukan perbandingan teori dan studi empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB VI Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian maupun dari pembahasan. Dalam hal ini kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil ringkas yang mudah dipahami dan dicermati oleh pembaca. Sedangkan saran dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Bukti Kendali Bimbingan Skripsi, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan dan Daftar Riwayat Hidup.